

Jurnal Studi Ilmu Politik, di Publish oleh Program Studi Ilmu Politik  
FISIP UIN Raden Fatah Palembang

## **MODEL KEPUTUSAN POLITIK REZIM TEKNOKRAT DI INDONESIA (STUDI PADA PERIODE PRESIDEN B.J HABIBIE)**

**Agung Setiawan<sup>1</sup>, Eti Yusnita<sup>2</sup>, Hatta Azzuhri<sup>3</sup>**

**<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah  
Palembang**

Email: [Agungstw28@gmail.com](mailto:Agungstw28@gmail.com)<sup>1</sup>, [etiyusnita\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:etiyusnita_uin@radenfatah.ac.id)<sup>2</sup>,  
[hatazzuhri\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:hatazzuhri_uin@radenfatah.ac.id)<sup>3</sup>.

### **ABSTRACT**

The title of this research is the Political Decision Model of the Technocrat Regime in Indonesia (Study During the Period of President B.J Habibie). The formulation of the problem in this research is how is the decision model of the technocrat regime in Indonesia (Presidential B.J Habibie Period Study) and what are the factors behind the technocratic regime's political decision model in Indonesia (Presidential B.J Habibie Period Study) literature as a reference. President B.J Habibie was sworn in on May 21, 1998, the first policy of President B.J. Habibie immediately announced and inaugurated a new cabinet called the Development Reform Cabinet on 22 May 1998. There were 36 ministers, consisting of 20 ministers for department heads, 12 ministers for state and 4 coordinating ministers. The Cabinet reflects all elements of the nation's strength, including the United Development Party, the Indonesian Democratic Party, the Working Group, ABRI, regional elements, scholars, and non-governmental organizations. Embracing all the political and social potential is the early democracy to demand reform. The basis of B.J Habibie's decision model comes from his proximity to Suharto as President of the Republic of Indonesia, young B.J Habibie Nationalism, B.J Habibie as an Expert in Science and Technology, introduction of B.J Habibie with Islamic figures, political situation and conditions of the New Order in 1990-1998.

**Keywords:** Decision Model, Technocrat, B.J Habibie

### **ABSTRAK**

Judul penelitian ini adalah Model Keputusan Politik Rezim Teknokrat di Indonesia (Studi Pada Periode Presiden B.J Habibie). Rumusan Masalah dalam penelitian adalah bagaimanakah model keputusan rezim teknokrat di Indonesia (Studi Periode Presiden B.J Habibie) dan apa faktor yang melatar belakangi model keputusan politik rezim teknokrat di Indonesia (Studi Periode Presiden B.J Habibie) Penelitian ini merupakan penelitian historis dengan pendekatan Kualitatif dan menggunakan studi pustaka sebagai referensi. Presiden B.J Habibie dilantik tanggal 21 Mei 1998, kebijakan pertama Presiden B.J. Habibie adalah langsung mengumumkan dan melantik kabinet baru yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei 1998. Terdapat 36 menteri, terdiri dari 20 menteri memimpin departemen, 12 menteri negara dan 4 menteri koordinator. Kabinet tersebut mencerminkan semua unsur kekuatan bangsa, meliputi Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, Golongan Karya, ABRI, unsur daerah, kaum cendekia, dan lembaga swadaya masyarakat. Merangkul semua potensi politik dan sosial adalah demokratisasi awal untuk menjawab tuntutan Reformasi. Dasar dari model keputusan B.J Habibie berasal dari Kedekatannya dengan Soeharto sebagai Presiden RI, Nasionalisme

B.J Habibie muda, B.J Habibie sebagai Ahli Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengenalan B.J Habibie dengan tokoh-tokoh Islam, situasi dan kondisi Politik Orde Baru Tahun 1990-1998.

**Kata Kunci :** Model Keputusan, Teknokrat, B.J Habibie

## **PENDAHULUAN**

Istilah teknokrat memiliki interelasi dengan banyak istilah yang terkait diantaranya yaitu teknorasi yang berarti pemerintahan yang dijalankan oleh teknokrat, lalu secara umum teknokrat, yang mengacu pada sekelompok teknokrat yang mengelola dan mengatur sumber daya dalam industri negara. Istilah berikutnya adalah teknokratisme, yang mengacu pada situasi di mana sekelompok teknokrat mengelola organisasi sumber daya di negara-negara industri.

Terakhir adalah istilah teknologi yang berarti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Teknokrat merupakan sebuah kata yang merujuk pada seorang ahli dalam teknik. Teknik adalah sebuah cara atau kepandaian membentuk sesuatu untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008). Di Indonesia sendiri, tokoh teknokrat yang cukup populer yaitu Bacharuddin Jusuf Habibie. Beliau dikenal sebagai seorang cendekiawan atau ahli teknologi yang berkiprah dalam pemerintahan. Habibie sendiri pernah menjabat sebagai presiden ketiga di Indonesia menggantikan Soeharto yang mundur dari jabatannya, saat itu Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden. Soeharto mundur setelah 32 tahun menjabat sebagai seorang Presiden. Banyak masalah yang terjadi mengakibatkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organisasi aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.

Setelah Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 yang mengakibatkan tewasnya empat mahasiswa dan memprovokasi protes Mei 1998 keesokan harinya, pemerintahan Suharto semakin terlihat. Pada puncaknya, orang-orang dari semua lapisan masyarakat turun ke jalan, menuntut agar Presiden Suharto, yang telah menjabat selama 32 tahun, segera mundur. (2017, R. Toto Sugiharto). Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 09.05 bertempat di Istana Merdeka di depan para menteri Soeharto menyampaikan pengunduran dirinya (B.J Habibie 2006). Merujuk Pada Undang-undang Dasar 1945 yaitu apabila seorang Presiden berhenti dari jabatannya secara konstitusional, maka Wakil Presiden-lah yang akan menggantikannya. Ini tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945, pasal 8 ayat (1), yang isi lengkapnya adalah

“Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya” (Undang-undang Dasar 1945).

Berakhirlah kekuasaan Soeharto diatas panggung politik, ia tidak bisa menahan badai reformasi yang digencarkan mahasiswa dan elemen masyarakat pro demokrasi. Soeharto menggenapi masa kekuasaannya hingga tiga dekade. Namun, di ujung akhir periode jabatannya, ia hanya mampu bertahan 72 hari menduduki kursi Republik Indonesia/RI 1, terhitung sejak 11 maret 1998 ia dilantik. Selanjutnya dimulai lah awal dari transisi orde baru ke orde reformasi yang dipimpin oleh Habibie. Habibie mengubah gaya kepemimpinan dari model otoriter ala Soeharto menjadi lebih demokratis. Ia mulai membuka keran kebebasan yang sebelumnya ditutup rapat-rapat di era Soeharto. Fenomena yang terjadi diawal kepemimpinannya ialah pemerintahan Habibie disambut positif oleh pasar dengan menaikinya sedikit nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi Rp. 10.650 per 1 dolar AS dari sebelumnya Rp 11.050 per 1 dolar AS.

Habibie banyak menghadapi poin-poin masalah yang sangat harus diselesaikan, dimulai dari Tragedi Semanggi yang menelan beberapa korban jiwa dan luka-luka, pengusutan harta kekayaan Soeharto dan keluarganya, menaikkan kembali mata uang Rupiah terhadap Dollar yang menyebabkan krisis ekonomi yang melanda di Indonesia, serta pembebasan para tahanan politik yang ditahan selama masa pemerintahan Orde Baru, dan tak kala penting hingga menyita perhatian dunia, terkhusus PBB adalah permasalahan kasus Hak Asasi Manusia yang terjadi di Timor Timur. (Symbolic Power in a Technocratic Regime: The Reign of B.J. Habibie in New Order Indonesia 2007).

Perlu tindakan dan kebijakan yang tepat dalam menanggapi berbagai permasalahan yang terjadi agar tidak terjadi prasangka dan praduga yang negatif di lingkungan masyarakat terhadap pemerintahannya, belum lagi ada beberapa kalangan dari mahasiswa maupun masyarakat yang tidak setuju Habibie menjadi presiden karena menganggap ia merupakan bagian dari pemerintahan dan mewarisi rezim Soeharto. Dari permasalahan inilah penulis tertarik meneliti bagaimana seorang ilmuwan atau teknokrat seperti Habibe memimpin Indonesia keluar dari krisis yang terjadi di Indonesia dengan latar belakangnya sebagai ilmuwan tanpa

basis ilmu politik yang ia punya, mengenai keputusan-keputusan politik yang dia ambil saat itu untuk menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi peneliian adalah sebuah upaya sistematis dalam rangka pemecahan masalah yang dilakukan peneliti agar dapat menjawab permasalahan atau fenomena yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan historis (kesejarahan) yang dimaksudkan untuk melihat model keputusan politik B.J Habibie saat menjadi presiden di Indonesia.

Dalam proses penelitian ini penulis menggunakan metode peneltian sejarah, yaitu Heuristik (pencarian sumber sejarah), Kritik sumber, Interpretasi (penjelasan sejarah), dan terakhir Historiografi (penulisan sejarah). Dimana sumber data berasal dari berita online, buku, jurnal, koran-koran, majalah, dan lain lain. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data penelusuran kepustakaan, yaitu data diperoleh dengan membaca buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan tema yang peneliti ambil, mengenai model keputusan politik Habibie. Data dari pustaka yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan dan dianalisa, kemudian diambil kesimpulan yang tepat dan sistematis.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **A. Model Keputusan Politik Rezim Teknokrat di Indonesia (Studi Periode Presiden B.J Habibie)**

BJ. Habibie adalah seorang ahli di bidang penerbangan. Dia tidak hanya seorang ilmuwan, tetapi juga seorang teknokrat yang bertanggung jawab atas pengembangan berbagai perusahaan teknologi tinggi di Indonesia. Para teknokrat diangkat ke posisi Presiden. Habibie menerima jabatan itu meski dalam kondisi sulit. Situasi krisis multifaset telah mengubah seluruh lanskap politik Indonesia.

Menurut Habibie, siapa pun yang menjadi Presiden pada saat seperti itu tidak dapat melakukan hal-hal sesuai dengan kehendaknya. Dia harus membuat keputusan berdasarkan keadaan. Indonesia akan terpecah jika tidak dilakukan. Ketidakstabilan politik seharusnya tidak lagi menjadi masalah di Indonesia, seperti yang terjadi antara tahun 1947 dan 1950.

Kebijakan pertama Habibie setelah dilantik sebagai Presiden pada 21 Mei 1998 adalah mengumumkan dan meresmikan kabinet baru yang diberi nama

Kabinet Reformasi Pembangunan, pada 22 Mei 1998. Total ada 36 menteri, termasuk 20 menteri yang membawahi kementerian. , 12 menteri negara, dan empat menteri yang membidangi koordinasi. Kabinet itu terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, Pokja, ABRI, unsur daerah, ulama, dan lembaga swadaya masyarakat, dan mencerminkan kekuatan bangsa.

Reaksi demokrasi paling awal terhadap tuntutan Reformasi adalah merangkul semua potensi politik dan sosial. Habibie pun mengambil keputusan untuk menarik Bank Indonesia dari kabinet. Tujuannya adalah agar BI menjadi organisasi mandiri yang mampu membuat keputusan kebijakan yang sehat tanpa perlu keterlibatan politik. Selanjutnya, negara tidak boleh lagi meminjam uang dari BI dan harus mengandalkan pasar modal. Inilah rencana Habibie untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan mengakhiri krisis moneter.

Habibie juga menjaga kebebasan berekspresi dan mendukung DPR/kredibilitas. MPR Dengan pengertian bahwa rakyat bebas mengungkapkan pikiran dan berdemonstrasi. Pers juga diberi ruang dan waktu untuk mengekspresikan diri. Tahanan politik telah dibebaskan, dan tidak seorang pun boleh dipenjarakan karena memiliki pandangan yang berbeda dengan presiden.

Dinasti Golkar dibubarkan, dan personel sipil tidak lagi diperlukan untuk memilih Golkar, memperkuat legitimasi DPR/MPR. Langkah selanjutnya adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membentuk partai politik yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 atau aturan MPR.

Secara keseluruhan, sebagai Presiden ke-3, ia telah melaksanakan perubahan ekonomi, politik, hak asasi manusia, dan birokrasi, serta menyelesaikan tantangan Timor Timur. Semua kebijakan diimplementasikan dalam konteks transformasi demokrasi Indonesia. Dengan melakukan penyesuaian yang signifikan ini, Habibie mampu menyelamatkan negara dari bencana. Banyak pihak yang menilai B.J. Habibie telah kehilangan pola pikir nasionalisnya, seperti terlihat dari berbagai kebijakan yang ia ambil selama menjadi Presiden, di mana B.J. Habibie dituding meninggalkan Timor Timur. Apalagi B.J. Habibie lebih banyak menghabiskan waktu di Jerman daripada di Indonesia. Namun, ketika B.J. Habibie masih kecil, ia tinggal dan dibesarkan di Indonesia pada masa kemerdekaan, ketika perang masih berkecamuk, dan hasratnya untuk Indonesia bebas dari penjajah dan

perang terlihat jelas. Nasionalisme B.J. Habibie Muda tidak diragukan lagi mempengaruhi profesinya.

B.J. Habibie Muda telah menunjukkan bahwa ia adalah seorang patriot. Hal ini terlihat pada tahun-tahun awal B.J. Habibie di Jerman, ketika ia dibawa ke sana oleh kaum ultra-nasionalis seperti Soekarno dan Mohd. Yamin. Sejak awal, B.J. Habibie didorong oleh konsep mengangkat negaranya keluar dari kemiskinan. Presiden Soekarno meminta kaum muda untuk pergi belajar ke luar negeri pada awal 1950-an, khususnya antara tahun 1954 dan 1956, dan kemudian kembali ke tanah air untuk membantu Indonesia menjadi negara yang benar-benar otonom dan mandiri, katanya kemudian kepada Presiden Suharto. Itu berdampak signifikan pada kehidupan B.J. Habibie. Namun, yang terpenting, meski memiliki pekerjaan terhormat di luar negeri, ia memutuskan pulang untuk mengabdikan pada negaranya, menunjukkan patriotisme, kesetiaan, dan kebangsaannya. (Bilveer Singh, hal. 34, 2000).

B.J. Habibie dituding kurang memiliki rasa nasionalisme bagi masyarakat Indonesia sepanjang karir politiknya, terutama saat menjabat sebagai presiden ketiga negara itu pada tahun 1998. Kemudian ia menyebutkan tempat tinggal pilihannya, yaitu Jerman. Jadi jelas bahwa B.J. Habibie telah memudar, karena ia meninggalkan politik dalam keadaan kacau balau, terutama pada tahun 1999, ketika masa jabatannya sebagai Presiden ke-3 Republik Indonesia berakhir. Akibatnya, tidak mungkin untuk menyangkal bahwa sikap nasionalis B.J. Habibie tidak salah lagi. Tahap awal karir politik B.J. dipengaruhi oleh Habibie yang masih muda. Habibie. Meskipun, saat ia naik pangkat di pemerintahan Indonesia, rasa nasionalismenya berangsur-angsur berkurang, terutama sebagai presiden ketiga negara itu.

Kita dapat menarik satu kesimpulan dari ini: perasaan nasionalisme B.J. kuat. Habibie muda yang telah diperbudak oleh penjajah, telah berpengaruh dalam mencapai tujuannya untuk kemajuan negaranya. Namun, saat ia berkembang dalam karirnya sebagai ahli teknologi dan naik pangkat, rasa patriotisme untuk tanah airnya mulai berkurang dan menurun. B.J. Habibie baru-baru ini hengkang dari kancah politik nasional, yang sebelumnya banyak terlibat, bahkan turut

mengembangkan rona baru ranah politik, sebagai buktinya. Selanjutnya, B.J. Habibie berkeinginan untuk tinggal di Jerman. (Ali Fachry, 1999, hal. 120).

Masuknya B.J. Habibie ke politik tidak diragukan lagi dipengaruhi oleh keahliannya sebagai spesialis teknologi, karena teknologi adalah bidang spesialisasi eksklusifnya. Akibatnya, kita dapat mengamati bahwa kekuatan politik B.J. Habibie berasal dari kemampuannya untuk memahami ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dalam situasi seperti itu, permintaan manusia akan ilmuwan dan insinyur sebenarnya lebih besar, karena ambiguitas dan kemudahan tenaga kerja yang dihasilkannya mendorong orang untuk mencari kepastian dan mencapai keunggulan kompetitif.

Semua ini pada akhirnya hanya dapat dicapai melalui kemajuan teknologi. Akibatnya, orang-orang yang menguasai atau memiliki kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara otomatis akan diangkat ke derajat yang lebih tinggi. B.J. Habibie, setelah dianggap ahli di bidang teknologi aeronautika, mengalami hal ini dan lainnya saat bekerja di Jerman Barat. Namun, di negara berkembang seperti Indonesia, permintaan akan seseorang yang berpengetahuan dan teknologi jauh lebih besar. (Ali Fachry, 1999, hal. 150).

Ketika strategi dan arah pembangunan “stagnan”, peran peneliti dan ilmuwan menjadi semakin penting bagi Indonesia. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa medan perdagangan global telah bergeser ke pembagian kerja horizontal, dengan keunggulan ilmiah dan teknologi yang semakin menentukan produksi komoditas perdagangan. Tentu saja, pergeseran politik di jajaran elit negara diperlukan untuk memberikan peran yang lebih besar kepada para ilmuwan tersebut.

Pengaruh para teknokrat—arsitek pembangunan ekonomi Orde Baru di bawah kepemimpinan Widjojo Nitisastro—dalam posisi penting pemerintahan, menurut Adam Schwarz, penulis buku “A Nation in Waiting, Indonesia in the 1990s.” Pada saat yang sama, sebagaimana dibuktikan dalam kabinet Presiden Suharto VI (1993-1998), apa yang disebut sebagai dominasi teknolog dalam pemerintahan mulai muncul.

Dalam hal lain, transformasi ini hanyalah klimaks dari proses yang berlarut-larut. Eksistensi B.J. Habibie sebagai ilmuwan “terkemuka” – bahkan di negara-

negara industri – menjadi semakin relevan ketika Indonesia dihadapkan pada pilihan dalam memilih strategi pembangunan, meskipun agak ketinggalan zaman dalam menjabarkannya di sini. Meski rencana pembangunan para teknokrat yang sudah ada sejak awal Orde Baru masih tetap berjalan, terbukti bahwa merintis metode pertumbuhan alternatif berbasis "ilmu pengetahuan" sudah menjadi kebutuhan.

Posisi politik B.J. Habibie menjadi signifikan dalam situasi ini. Dalam arti statusnya sebagai sosok yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi landasan yang kuat bagi upayanya untuk berperan dalam menentukan keputusan strategis nasional tentang jalur pertumbuhan. (Ali Fachry, 1999, hal. 150) B.J. Habibie memperoleh "pijakan politik" dalam menciptakan pertumbuhan masa depan bangsa Indonesia karena latar belakangnya sebagai ilmuwan dan teknolog yang andal dan pemikirannya tentang metode pembangunan alternatif berbasis sains dan teknologi. Alhasil, kompetensi B.J. Habibie di bidang iptek juga menjadi salah satu faktor pendorong dalam keputusannya untuk terjun ke kancah politik nasional. Hal ini terlihat ketika ia tergabung dalam kelompok teknokrat, dimana B.J. Habibie berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Fungsi ekonomi bergeser ke politik nasional seiring perkembangannya, karena faktor ekonomi mempengaruhi kondisi politik dan sebaliknya.

## **B. Faktor yang melatarbelakangi Model Keputusan Politik Rezim Teknokrat di Indonesia (Studi Periode Presiden B.J Habibie)**

B.J. Habibie terjun pertama ke politik terjadi pada tahun 1990, ketika ia terpilih sebagai Ketua Umum Komite Internasional Cendekiawan Muslim. B.J. Habibie diangkat sebagai Koordinator Harian Pembina Golkar pada 1993. Keputusan B.J. Habibie terjun ke dunia politik tak pelak lagi dipengaruhi oleh sejumlah keadaan. Berikut ini adalah beberapa faktor tersebut.

### **1. Kedekatan B.J. Habibie dengan Soeharto sebagai Presiden RI**

Kemampuan, tawaran B.J. Habibie untuk jabatan politik tertinggi sebagian dibantu oleh fakta bahwa ia telah menjadi orang kepercayaan Presiden Suharto pada awal 1990-an. Interaksi pribadi telah ada untuk waktu yang lama, dimulai pada awal 1950-an, dan ini mengarah pada pengembangan kepercayaan. (Bilveer Singh, hal. 34, 2000). Hubungan Suharto dengan keluarga B.J. Habibie dimulai pada tahun



1950. Letnan Kolonel Suharto memimpin Brigade Ekspedisi Divisi Diponegoro, sering dikenal sebagai Brigade Mataram, ke Makassar untuk menumpas pemberontakan Andi Aziz. Markas Brigade terletak di Jalan Klaperlaan Makassar, di mana jalan tersebut juga merupakan rumah bagi apartemen B.J. Habibie.

Kemampuan, tawaran B.J. Habibie untuk jabatan politik tertinggi sebagian dibantu oleh fakta bahwa ia telah menjadi orang kepercayaan Presiden Suharto pada awal 1990-an. Interaksi pribadi telah ada untuk waktu yang lama, dimulai pada awal 1950-an, dan ini mengarah pada pengembangan kepercayaan. (Bilveer Singh, hal. 34, 2000). Dalam rangka memperingati setengah abad B.J. Habibie, Presiden Soeharto menulis, "Dalam operasi teritorial untuk memajukan persatuan dengan rakyat, seluruh anggota brigade selalu berhubungan dengan rakyat dalam rangka bersatu dengan rakyat, selalu memegang anjangsana bagi masyarakat, terutama pada hari libur. Anggota staf brigade juga sangat dekat dengan penduduk di sekitar pangkalan. Di antara warga sekitar Markas Brigade Mataram di Jalan Klaperlaan adalah keluarga B.J. Habibie."

Presiden Soeharto menceritakan bahwa suatu hari di tengah malam, ketika anggota brigade sedang tidur nyenyak, keluarga B.J. Habibie datang ke asrama sambil menangis. Mereka memberitahunya bahwa ayahnya dalam kondisi kritis. Soeharto tiba di rumah mereka tak lama kemudian, ditemani oleh dokter Irsan. "Alwi Abdul Jalil, ayah B.J. Habibie, mengalami serangan jantung dan tidak bisa diselamatkan. Di depan saya, dokter Irsan, dan keluarga, ayah B.J. Habibie mengembuskan napas terakhir. Saya yang menutup mata nya dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk pengampunannya," tulis Presiden (Adian Husaini 1995: 60).

Keterkaitan B.J. Habibie dengan Suharto menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusannya untuk terjun ke dunia politik. Awal pengenalan Soeharto dengan keluarga B.J. Habibie, jabatan yang dijabat B.J. Habibie, izin memimpin ICMI, dan kepercayaan untuk menyerahkan jabatan kritis kepada Partai Golkar, semuanya menunjukkan hal itu. Tentu saja, kita dapat menyimpulkan bahwa di bawah pemerintahan Suharto, B.J. Habibie berada dalam posisi yang menguntungkan baik bagi rezim Suharto dan B.J. Habibie menganggap itu sebagai batu loncatan ke dalam politik nasional.

## **2. Nasionalisme BJ Habibie Muda**

Banyak pihak yang menilai B.J. Habibie telah kehilangan pola pikir nasionalisnya, seperti terlihat dari berbagai kebijakan yang ia ambil selama menjadi Presiden, di mana B.J. Habibie dituding meninggalkan Timor Timur. Selain itu, B.J. Habibie lebih banyak menghabiskan waktu di Jerman daripada di Indonesia. Namun, ketika B.J. Habibie masih kecil, ia tinggal dan dibesarkan di Indonesia pada masa kemerdekaan, ketika perang masih berkecamuk, dan hasratnya untuk Indonesia bebas dari penjajah dan perang terlihat jelas. Nasionalisme B.J. Habibie Muda tidak diragukan lagi mempengaruhi profesinya.

Ketika dia dikirim ke Jerman oleh ultra-nasionalis seperti Sukarno dan Mohd. Yamin, B.J. Habibie Muda diilhami oleh Presiden Soekarno yang memerintahkan kaum muda untuk pergi ke luar negeri untuk menuntut ilmu, kemudian kembali ke tanah air untuk membantu Indonesia menjadi negara yang benar-benar merdeka dan mandiri di awal tahun 1950-an, terutama antara tahun 1954 dan 1956, kata Presiden Soekarno. hal-hal yang Meskipun kedudukannya meningkat di dunia luar, ia tetap merasa berkewajiban untuk kembali ke tanah airnya, yang merupakan perwujudan patriotisme, pengabdian, dan kebangsaan. (Bilveer Singh, 2000, hal. 34). B.J Habibie memiliki rasa patriotisme yang kuat. Habibie muda yang telah diperbudak oleh penjajah, telah berpengaruh dalam mencapai tujuannya untuk kemajuan negaranya. Namun, seiring dengan kemajuan karirnya sebagai pakar teknologi dan naik pangkat, rasa patriotismenya mulai memudar dan terkikis, terbukti dengan kenyataan bahwa B.J. Habibie kini telah keluar dari kancah politik nasional, di mana ia sebelumnya telah terlibat secara mendalam, dan bahkan membantu menciptakan warna baru bagi arena politik. Selanjutnya, B.J. Habibie berkeinginan untuk tinggal di Jerman.

## **3. B.J. Habibie Sebagai Ahli Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)**

Masuknya B.J. Habibie ke politik tidak diragukan lagi dipengaruhi oleh keahliannya sebagai spesialis teknologi, karena teknologi adalah bidang spesialisasi eksklusifnya. Akibatnya, kita dapat mengamati bahwa kekuatan politik P B.J. Habibie berasal dari kemampuannya untuk memahami ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dalam situasi seperti itu, kebutuhan manusia akan ahli ilmu pengetahuan dan teknologi semakin besar, karena iklim ketidakpastian, serta

kemudahan tenaga kerja yang dibinanya, mendorong manusia untuk mencari kepastian dan mencapai keunggulan kompetitif.

Semua ini, pada akhirnya, hanya dapat dicapai melalui kemajuan teknologi. Akibatnya, orang-orang yang menguasai atau memiliki kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara otomatis akan diangkat ke derajat yang lebih tinggi. B.J. Habibie, setelah dianggap ahli di bidang teknologi aeronautika, mengalami hal ini dan lainnya saat bekerja di Jerman Barat. Namun, di negara berkembang seperti Indonesia, permintaan akan seseorang yang berpengetahuan dan teknologi jauh lebih besar.

Ketika strategi dan arah pembangunan “stagnan”, peran peneliti dan ilmuwan menjadi semakin penting bagi Indonesia. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa medan perdagangan global telah bergeser ke pembagian kerja horizontal, dengan keunggulan ilmiah dan teknologi yang semakin menentukan produksi komoditas perdagangan. Tentu saja, pergeseran politik di jajaran elit negara diperlukan untuk memberikan peran yang lebih besar kepada para ilmuwan tersebut. Berkurangnya pengaruh para teknokrat arsitek keberhasilan ekonomi Orde Baru di bawah kepemimpinan Widjojo Nitisastro dalam posisi penting pemerintahan, menurut Adam Schwarz, penulis buku “A Nation in Waiting, Indonesia in the 1990s.” Pada saat yang sama, dominasi apa yang disebut teknolog dalam pemerintahan mulai muncul, seperti yang terlihat dari susunan kabinet Presiden Soeharto VI (1993-1998).

Dalam hal lain, transformasi ini hanyalah klimaks dari proses yang berlarut-larut. Eksistensi B.J. Habibie sebagai ilmuwan “terkemuka”, bahkan di negara-negara industri – menjadi semakin relevan ketika Indonesia dihadapkan pada pilihan dalam memilih strategi pembangunan, meskipun agak ketinggalan zaman dalam menjabarkannya di sini. Meski rencana pembangunan para teknokrat yang sudah ada sejak awal Orde Baru masih tetap ada, ternyata merintis metode pertumbuhan alternatif berbasis “ilmu” sudah menjadi kebutuhan. Posisi politik B.J.

Habibie menjadi signifikan dalam situasi ini. Dalam arti statusnya sebagai sosok yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi landasan yang kuat bagi upayanya untuk berperan dalam menentukan keputusan strategis nasional tentang jalur pertumbuhan. (Ali Fachry, 1999, hal. 120) B.J. Habibie memperoleh

"pijakan politik" dalam menciptakan pertumbuhan masa depan bangsa Indonesia karena latar belakangnya sebagai ilmuwan dan teknolog yang andal dan pemikirannya tentang metode pembangunan alternatif berbasis sains dan teknologi.

Alhasil, kompetensi B.J. Habibie di bidang IPTEK menjadi salah satu faktor pendorong keputusannya untuk terjun ke kancah politik nasional. Hal ini terlihat ketika ia tergabung dalam kelompok teknokrat, dimana B.J. Habibie berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Fungsi ekonomi bergeser ke politik nasional seiring perkembangannya, karena faktor ekonomi mempengaruhi kondisi politik dan sebaliknya.

#### **4. Perkenalan B.J. Habibie Dengan Tokoh-Tokoh Islam Lewat ICMI**

B.J. Habibie terpilih sebagai ketua umum ICMI atas bantuan mahasiswa Brawijaya Malang dan cendekiawan Muslim yang mengadvokasi pengembangan organisasi bergaya Islam. Dukungan untuk B.J. Habibie didasarkan pada sejumlah faktor, termasuk prestasinya yang telah diakui secara nasional dan dunia, serta keyakinan para ahli akan ketulusan dan komitmennya terhadap Islam, yang dijunjung tinggi oleh umat Islam melebihi segalanya<sup>52</sup>. Alhasil, B.J. Habibie dinilai mampu menjalankan dan menuntaskan tujuan inti ICMI. (Adian Husaini 1995: 57).

B.J. Habibie mengandalkan dukungan dan alasan ini sampai ia terpilih sebagai ketua umum ICMI. Hal ini memungkinkan B.J. Habibie untuk bertemu dengan para intelektual Muslim dan tokoh-tokoh Islam lainnya yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan Islam di Indonesia, termasuk Dawam Raharjo, Dr. Ir. Muslimin Nasution, Dr. Imaduddin Abdurrahim, Dr. M. Amien Rais, Dr. Riswanda Imawan, Dr. H. Said Agil Munawar, Prof. Dr. Harun Nasution, Dr. Nurcholish Madjid.

Dukungan dan pengetahuan B.J. Habibie dengan individu-individu Muslim ini memberinya pengalaman baru dalam organisasi Islam dalam bentuk konflik melawan umat Islam, khususnya dalam politik Islam Indonesia. Sebab, meski bukan organisasi politik, ICMI telah memberikan rona baru bagi politik Islam Indonesia sejak lahir pada tahun 1990. Ini merupakan alasan yang wajar, karena beberapa pengurus ICMI memiliki latar belakang sebagai aktivis Islam, yang paling

menonjol di antaranya adalah Dr. Imaduddin Abdurrahim, Dr. Nurcholish Madjid, dan Dawam Raharjo.

Kita tahu bahwa B.J. Habibie adalah salah satu menteri kabinet Orde Baru yang paling lama menjabat dan ahli teknologi, sehingga ia tidak mungkin akrab dengan gerakan perjuangan Islam di Indonesia, apalagi aktivis Islam penting dan terkemuka di tingkat nasional. B.J. Habibie memperoleh pengalaman dan peluang baru sebagai hasil keterlibatannya di ICMI, termasuk kontak langsung dengan sejumlah aktivis Islam terkemuka.

Perkenalan B.J. Habibie dan ikon-ikon aktivis Islam inilah yang menginspirasi B.J. Habibie untuk melangkah lebih jauh dan memperjuangkan umat Islam di Indonesia. B.J. Habibie dan berbagai tokoh Islam telah melakukan beberapa gerakan untuk mendukung perjuangan umat Islam, khususnya melalui dakwah langsung dengan umat Islam, melalui ICMI. Hal ini tentunya menjadi salah satu pendorong di balik keputusan B.J. Habibie untuk terjun ke dunia politik, khususnya politik Islam di Indonesia.

## **5. Situasi dan Kondisi Politik Orde Baru Tahun 1990-1998**

Pemerintahan Soeharto, yang dikenal sebagai Orde Baru, berlangsung dari pertengahan tahun 1965 hingga 1998. Jika menengok ke belakang cukup jauh, Anda dapat melihat seberapa dalam penanaman politik Orde Baru telah mempengaruhi rakyat Indonesia. Soeharto, sebagai Presiden kedua Republik Indonesia, tampaknya diuntungkan dari penindasan G30S. Pertama, Suharto mampu meyakinkan masyarakat, khususnya elit politik, bahwa pertikaian sektarian yang sedang berlangsung tidak menguntungkan, melainkan merugikan kemajuan. Bahwa setiap aliran sesat yang berusaha untuk mendapatkan kekuasaan hanya akan berhasil menghancurkan dirinya sendiri, seperti yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, karena ia tidak memiliki sumber daya yang diperlukan.

Mungkin ada satu aliran paling kuat yang bisa menang sendiri. Suharto kemudian membujuk MPRS untuk mengurangi jumlah partai politik menjadi hanya dua, tujuan yang telah dicita-citakan Soekarno tetapi tidak pernah tercapai. Untuk menghadapi kekuatan sekte tersebut, Presiden Suharto ternyata membutuhkan kekuatan pendukung "alternatif" yang tidak berasal dari kekuatan sekte tersebut, agar tidak jatuh seperti Sukarno. Golkar dan ABRI dikonsultasikan untuk opsi.

Sekretariat Gabungan Golkar, yang didirikan bersama ABRI dan Sukarno untuk mendukung Demokrasi Terpimpin, adalah sebuah pilihan. Rezim Suharto menggunakan Golkar sebagai "alibi" terhadap perlawanan dari kelompok politik yang masih mengusung esensi aliran tersebut<sup>56</sup>. Sementara itu, dengan diperkenalkannya gagasan 'Dwi Fungsi'<sup>57</sup> dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, status ABRI sebagai salah satu saluran dari Golkar diberi peran khusus dalam pemerintahan. Jika melihat kekuasaan pemerintahan Suharto, itu karena Partai Golkar sebagai OPP dan ABRI sebagai tangan kanan Suharto dalam pemerintahan. Selama 32 tahun pemerintahan Suharto, hal ini terus berlanjut.

Begitulah situasi politik di Indonesia pada tahun 1997-98, ketika rezim Suharto sedang kacau balau. Hal ini berdampak pada bidang ekonomi dan hukum, karena saling terkait dan saling menguntungkan. Dan berakhirnya kediktatoran Suharto, yang dikenal dengan Orde Baru, serta penyerahan kekuasaan kepada pemerintahan B.J. Habibie, yang dikenal dengan masa reformasi. Peristiwa dan keadaan tersebut bukanlah pemicu B.J. Habibie terjun ke dunia politik, tetapi menjadi batu loncatan baginya untuk mencapai puncak karir politiknya, yaitu sebagai Presiden ke-3 Republik Indonesia. Akibatnya, kita harus memahami tragedi ini sampai masa pemerintahannya berakhir pada tahun 1999.

## **KESIMPULAN**

Dengan latar belakang sebagai seorang ilmuwan dan teknolog handal serta gagasannya tentang strategi pembangunan alternatif berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi inilah B.J. Habibie mendapatkan "pijakan politis" dalam mendesain perkembangan bangsa Indonesia di masa depan. Jadi kemampuan B.J. Habibie dalam IPTEK juga merupakan salah satu faktor pendorong dalam memasuki percaturan politik nasional. Hal ini dapat kita lihat ketika ia masuk dalam kelompok teknokrat, dimana B.J. Habibie mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Kemudian dalam perkembangannya peran tersebut bergeser ke dalam perpolitikan nasional, karena memang kondisi ekonomi mempengaruhi kondisi politik dan sebaliknya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, F. (1999). *Esai Politik Tentang Habibie*, Jakarta: Balai Pustaka.  
Aning S, Floriberta. (2006). *100 Tokoh Yang Mengubah Dunia*.  
Cholisin & Nasiwan (2012). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ombak

Design Associates

Dharma.Djamaluddin, D. (1998) *Gejolak Reformasi Menolak Anarki*. Bandung: Zaman,

Fakih, F. (2013). *The Rise of the Managerial State in Indonesia: Institutional Transition during the Early Independence Period:1950-1965*. Disertasi di Universitas Leiden.

Ferguson, J. (1997). *The Anti-politics machine: "Development," De-politicization, and Bureaucratic Power in Lesotho*. Minnesota: University of Minnesota Press.

Gottschalk, Louis. (1986). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Habibie, B, J. (2006). *Detik-Detik Menentukan*, Jakarta: THC Mandiri.

Hefner, Robert W. (1995). *ICMI dan Perjuangan Menuju Kelas Menengah Indonesia*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.

Heuken. (1984). *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*.

Husaini, A. (1995). *Habibie Soeharto dan Islam*. Jakarta: Gema Insani Pres. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

K, Adam,. K Jessica. (1996). *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*.

Koentjaraningrat. (2000). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Kuntowijoyo. (2001). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

Makka, M. (2008). *The True Life of Habibie (Cerita dibalik Kesuksesan)*. Jakarta:

Mallarangeng, R. (2005). *Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986- 1992*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

*New Order Indonesia*. Journal of Social Issues in Southeast Asia Vol. 22, No. 1

Novianto, A. (2015), Cengkeram Mesin Anti-Politik dan Depolitisasi Pembangunan, *Jurnal Suluh Pergerakan*, Vol. 1 No. 1, pp. 199-209. Pustaka Iman.

Ransom, D. (2006). *Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia*.

Shadily, H. (1984). *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.

Shadily, H. (1984). *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.

Sing, Bilveer. (2000). *Habibie and the Democratisation of Indonesia*, Singapore: Crescent

Sudiarja, A, (2005). *Arah Reformasi Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Sanata

Sugiharto, R. T. (2017). *Biografi Politik Habibie*, Yogyakarta: Media Pressindo.

Sulfikar, A. (2007). *Symbolic Power in Technocratic Regime: The Reign of B.J Habibie in*

Sulfikar, A. (2012). *The Technological State in Indonesia: The Co-constitution of High Technology and Authoritarian Politics*. New York: Routledge.

Wacana Mulia.

Winarno, B. 2008 *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: MediaPressindo.